

KINERJA ORGANISASI PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI KRISIS PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI ANALISIS KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO)

Leni Rohida^{1,*}, Siti Adira²,

¹²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Swadaya Gunung Jati

*Corresponding Author: leni.rohida@ugj.ac.id; llehida2@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the performance of Indonesian government institutions in dealing with the COVID-19 pandemic crisis with a focus on President Joko Widodo's leadership. The COVID-19 pandemic has posed major challenges to various areas of government, including health, the economy, and social policy. This research uses a qualitative approach, where initially the author describes the leadership background of President Joko Widodo. The data used in this study are secondary data in the form of data and information in the form of President Joko Widodo's attitudes and behaviors as seen from the policies taken to handle the crisis, information from the official website, and the results of previous research related to Joko Widodo's leadership on the performance of government organizations in facing crises. This analysis uses contingency theory. Fred Fiedler's Contingency Theory focuses on the idea that a leader's effectiveness depends heavily on the suitability of the leadership style to the situation at hand. Fiedler identified three main dimensions that affect the leadership situation, the relationship between leaders and members, and the structure of tasks and position powers.

Keywords: *Performance of government organizations, COVID-19 pandemic, Joko Widodo's leadership, crisis management, policy*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja institusi pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 dengan fokus pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan besar pada berbagai bidang pemerintahan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana awalnya penulis menguraikan latar belakang kepemimpinan presiden Joko Widodo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data dan informasi berupa sikap dan perilaku presiden Joko Widodo yang dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil untuk penanganan krisis, informasi dari *website* resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan kepemimpinan Joko Widodo terhadap kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis. Analisis ini menggunakan teori kontingensi. Teori Kontingensi dari Fred Fiedler berfokus pada gagasan bahwa efektivitas seorang pemimpin sangat bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Fiedler mengidentifikasi tiga dimensi utama yang mempengaruhi situasi kepemimpinan, hubungan pemimpin dan anggota, serta struktur tugas dan kekuasaan posisi.

Kata Kunci *Kinerja organisasi pemerintah, pandemi COVID-19, kepemimpinan Joko Widodo, manajemen krisis, kebijakan.*

PENDAHULUAN

Pendahuluan Ketidakpastian kondisi global saat ini dirasakan oleh setiap negara di dunia. Kondisi yang berubah-ubah ini dipicu oleh beberapa tantangan yang sekarang ini sedang terjadi dan membawa pengaruh besar bagi sikap seorang pemimpin. Respons yang cepat dan koordinasi yang kuat dari pemerintah dibutuhkan untuk pemulihan kondisi secara umum dan khusus pada bidang ekonomi yang terkena dampak besar. Respons terhadap perubahan alam, persaingan ekonomi global dan teknologi memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Krisis dan kepemimpinan adalah fenomena yang saling terkait erat. Orang-orang melihat krisis sebagai episode ancaman dan tidak tentu, keadaan yang sulit yang membutuhkan tindakan segera. Seperti yang dikatakan oleh Rosenthal and comfort (2021) bahwa “*Crisis and leadership are closely intertwined phenomena. People experience crises as episodes of threat and uncertainty, a grave predicament requiring urgent action* (Boin and Heart, 2003)”.

Lingkungan masyarakat akan mengalami banyak dinamika perubahan dan perkembangan. Dinamika tersebut membutuhkan seseorang figur untuk mengarahkan anggotanya jika suatu saat terjadi ketidakstabilan. Seseorang tersebut dapat disebut dengan pemimpin. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mempunyai keahlian dalam mengembangkan orang-orang yang berada di bawahnya dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dan direncanakan sejak awal. Seorang pemimpin organisasi atau perusahaan akan dinyatakan sebagai

pemimpin jika orang tersebut sudah sukses dan ahli dalam mengarahkan bawahannya kepada visi misi organisasi atau perusahaan tersebut (Alhudori & Aldino, 2017, p. 23).

Seorang pemimpin yang dihadapkan pada situasi krisis harus mampu merespons dengan cepat setiap masalah yang ada. Masalah dalam krisis pada umumnya terjadi di kondisi lingkungan yang dinamis. Pemimpin harus mampu mengajak seluruh organisasinya beradaptasi dan berkolaborasi untuk mengatasi ketidaktentuan yang ada dengan meminimalisir risiko yang terjadi serta mampu bertahan dalam kondisi yang sulit. Hal ini merupakan ciri yang dimiliki oleh kepemimpinan krisis. Dalam buku berjudul *Crisis Leadership: The Art of Adapting to Extreme Event*, crisis leadership diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam merespons kondisi lingkungan yang dinamis dengan mengajak seluruh unsur dalam organisasinya untuk beradaptasi dan berkolaborasi guna menghadapi ketidakpastian (krisis) yang terjadi (Pfeifer, 2013).

Di dalam suatu negara, tentu saja figur seorang pemimpin yang kompeten sangat dibutuhkan. Salah satu fungsi dari pemimpin itu ialah menjadi figur dan menjadi perwakilan untuk kelompoknya, namun dalam hal ini konteksnya ialah seorang presiden yang mewakili kelompoknya atau dapat disebut sebagai rakyatnya. Seorang pemimpin pun tidak akan jauh dari kata kekuasaan. Kepemimpinan suatu negara menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi berbagai krisis. Hulser berpendapat bahwa kepemimpinan ialah suatu proses untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam proses suatu kepemimpinan, terjadi pembagian

kekuasaan, pembagian tersebut tidaklah sama antara pemimpin dengan para anggotanya. Pemimpin memiliki pengaruh terhadap anggotanya agar anggotanya dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diberi. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus memiliki aspek yang terkait dengan nilai, keterampilan dan gaya kepemimpinan yang baik agar para anggotanya dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin dengan baik.

Dalam analisa ini akan membahas gaya kepemimpinan Joko Widodo. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah menjabat sejak tahun 2014 hingga 2024, telah diwarnai dengan berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. Dalam konteks ini, analisis terhadap kepemimpinan Jokowi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan dan strategi yang diambilnya berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi beragam krisis, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun kesehatan.

Joko Widodo, seorang mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan berfokus pada pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi. Namun, masa kepresidenannya juga menghadapi beberapa krisis yang memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. Krisis ekonomi, yang diakibatkan oleh fluktuasi harga komoditas global dan dampak dari krisis finansial, menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh Jokowi. Selain itu, krisis sosial-politik, yang muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta protes besar-besaran yang terjadi selama masa jabatannya, menunjukkan pentingnya

kepemimpinan yang adaptif dan responsif. Dalam menganalisis kepemimpinan Jokowi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana visi dan misinya sejalan dengan kinerja jangka pendek dan jangka panjang organisasi pemerintahan. Beberapa analisis menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, banyak tantangan yang masih perlu diatasi, seperti isu korupsi, ketidakadilan sosial, dan hambatan dalam birokrasi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan Jokowi terhadap kinerja organisasi pemerintahan dalam konteks krisis, dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang memperhatikan perspektif berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan praktisi pemerintahan. Dengan menggali berbagai tantangan yang dihadapi dan respons yang diberikan, diharapkan analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika kepemimpinan di Indonesia serta implikasinya terhadap masa depan pemerintahan.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana awalnya penulis menguraikan latar belakang kepemimpinan presiden Joko Widodo. Selanjutnya, penulis membahas dan menganalisis tentang kepemimpinan Joko Widodo terhadap kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data dan informasi berupa sikap dan perilaku presiden Joko Widodo yang dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil untuk penanganan krisis, informasi dari *website*

resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan kepemimpinan Joko Widodo terhadap kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis. Analisis ini menggunakan teori kontingensi. Teori Kontingensi dari Fred Fiedler berfokus pada gagasan bahwa efektivitas seorang pemimpin sangat bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Fiedler mengidentifikasi tiga dimensi utama yang mempengaruhi situasi kepemimpinan. Hubungan pemimpin dan anggota, Struktur Tugas dan Kekuasaan posisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kepemimpinan merupakan proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memengaruhi atau merepresentasikan pada anggota guna meraih tujuan organisasi tersebut (Purnomo & Saragih, 2016, p. 1). Kepemimpinan juga mempunyai makna terkait hal sifat, perilaku, pola interaksi, hubungan peran, serta suatu pekerjaan diposisi administrasi (Yukl, *Leadership in Organizations Seventh Edition*, 2010, p. 20). Pada dasarnya krisis sering acak, tak terduga dan baru. Kadang-kadang, skala insiden belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. Namun demikian, para pemimpin mempersiapkan diri mereka sendiri untuk beragam keadaan mendesak, mulai dari bencana alam dan buatan manusia, hingga krisis keuangan dan teknologi yang mengganggu. Ini melibatkan risiko berisiko tinggi dan hasil yang tidak pasti yang bergantung pada respons adaptif. Manajemen krisis seringkali berfokus pada ancaman atau kondisi lingkungan fisik dari suatu kejadian. Namun, krisis memiliki banyak. Pada dasarnya krisis sering acak, tak terduga dan baru. Kadang-kadang, skala insiden belum pernah terjadi sebelumnya

dan luar biasa. Namun demikian, para pemimpin mempersiapkan diri mereka sendiri untuk beragam keadaan mendesak, mulai dari bencana alam dan buatan manusia, hingga krisis keuangan dan teknologi yang mengganggu. Dalam konteks penanggulangan krisis (*crisis management*) maka faktor kepemimpinan (*leadership*) memegang peranan yang sangat krusial. Sebagaimana disampaikan oleh Gene Klann dalam buku *Crisis Leadership*, kepemimpinan senior dari suatu organisasi merupakan kunci pada saat sebelum, ketika dan setelah krisis. Kualitas dari seorang pemimpin (*leader*) dapat menentukan durasi, tingkat keparahan, dan konsekuensi akhir dari krisis. Para pemimpin mampu mengatur ritme penanggulangan krisis dengan langsung memberikan teladan serta menunjukkan perilaku yang diharapkan selama situasi krisis.

Karakteristik dan Gaya Kepemimpinan Joko Widodo

Indonesia telah mengalami 7 (tujuh) kali pergantian presiden. Karakter maupun gaya kepemimpinan mengalami perubahan dan perbedaan dari masa ke masa. Presiden Jokowi sebagai Presiden RI yang ketujuh pun mempunyai karakteristik dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Dari hasil analisa kepemimpinan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2018, didapatkan hasil bahwa Presiden Jokowi mempunyai karakteristik dan gaya kepemimpinan sebagai berikut (Supriadi, 2018):

No	Karakteristik Kepemimpinan	Gaya Kepemimpinan
1	Tidak pandang bulu	Blusukan
2	Pro Rakyat Kecil	Tidak mau ribet
3	Sederhana	Membuat solusi terhadap masalah yang ada
4	Sangat Tegas	Memiliki konsep <i>servant</i> atau pemimpin adalah seorang pelayan
5	Konsisten	Membuat keefektifan suatu lembaga negara dengan pembagian secara jelas
6	Cenderung Lambat	Selalu membuat inovasi dari cara mendengarkan keluhan rakyat
7	Sulit untuk Ditebak	

Tabel 1 Supriadi 2018

Dari tabel di atas, jika dianalisis dengan 2 (dua) gaya kepemimpinan, yaitu antara gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional, maka gaya kepemimpinan Presiden Jokowi lebih cenderung pada gaya kepemimpinan transaksional, walaupun ada sedikit ke arah transformasional, yaitu dengan inovasi yang dibuat oleh beliau.

Kepemimpinan Joko Widodo di Masa Krisis Pandemi Covid-19

Analisis kepemimpinan Joko Widodo terhadap kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis, terutama selama pandemi COVID-19, menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinan transformasionalnya berperan penting dalam pengelolaan krisis. Joko Widodo, sebagai presiden, telah menerapkan pendekatan yang mengedepankan komunikasi yang jelas dan transparan, yang terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemimpin sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional selama masa krisis, seperti yang terlihat dalam studi mengenai kepemimpinan selama pandemi COVID-19

(Kimhi et al., 2021; Ahern & Loh, 2020). Dalam konteks ini, Joko Widodo menggunakan bahasa yang lugas dan persuasif dalam pidatonya, yang membantu memperkuat ideologi dan kekuasaan yang ia wakili (Pujiningtyas, 2020).

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020 hadir sebagai tantangan tanpa preseden bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menjadi sorotan. Masyarakat, pengamat politik, dan para ahli kesehatan mengamati bagaimana pendekatan dan keputusan yang diambil Presiden Jokowi mempengaruhi penanganan krisis kesehatan ini. Gaya kepemimpinannya, yang cenderung pragmatis dan responsif, menjadi pusat analisis dalam memahami efektivitasnya.

Salah satu aspek penting dari kepemimpinan Jokowi selama pandemi adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Sejak awal, Jokowi menyadari bahwa penanganan pandemi memerlukan pendekatan cepat dan terarah. Ia memilih untuk membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang bertujuan untuk mengintegrasikan upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, Jokowi menunjukkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif, di mana ia mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk para ahli kesehatan, ekonom, dan pemimpin daerah, untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan.

Keputusan Jokowi untuk mengajak partisipasi publik dan ahli dalam penanganan COVID-19 mencerminkan gaya kepemimpinan yang inklusif. Hal ini terlihat dalam pertemuan-pertemuan virtual

yang diadakan dengan berbagai pihak, di mana Jokowi mendorong masukan dan saran untuk kebijakan yang diambil. Sudut pandang ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan bergerak dari dasar, dengan melibatkan kepentingan rakyat.

Sebagai pemimpin, Jokowi menyadari pentingnya kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa respons terhadap COVID-19 terkoordinasi dengan baik. Dalam hal ini, ia menerapkan gaya kepemimpinan yang desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan otonomi untuk menentukan langkah-langkah lokal berdasarkan konteks masing-masing. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan respon penguasaan lokal dalam menangani dampak dari pandemi.

Sebagai contoh, kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi juga dikoordinasikan melalui berbagai kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan, serta melibatkan pemerintah daerah. Meskipun upaya ini terlihat positif, dalam penerapannya terdapat tantangan dan masalah birokrasi yang masih harus diperbaiki. Beberapa daerah melaporkan kesulitan dalam pendistribusian bantuan sosial, yang sering kali mengalami keterlambatan dan tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Jokowi telah berusaha membangun sistem koordinasi, efektivitas implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Gaya kepemimpinan Jokowi yang terbuka dan komunikatif juga menjadi salah satu strategi kunci dalam menangani krisis. Dalam situasi ketidakpastian, komunikasi yang efektif adalah hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah. Jokowi seringkali memberikan *update* langsung melalui siaran pers dan media sosial mengenai perkembangan penanganan COVID-19 dan langkah-langkah pemerintah. Dengan cara ini, ia menciptakan saluran informasi yang jelas dan transparan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kekhawatiran dan kebingungan publik.

Namun, tantangan komunikasi tetap ada. Beberapa kritik menyebutkan bahwa pendekatan pemerintah di awal pandemi kurang cukup cepat dan tanggap dalam menyampaikan informasi terkait risiko penyebaran virus. Menurut hasil penelitian dari Lembaga Survei Indonesia (2021), terdapat kebingungan di masyarakat mengenai kebijakan yang diambil, terutama terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan keputusan mengenai zona merah dan hijau. Meskipun ada upaya dari Jokowi untuk berkomunikasi, tantangan dalam mengelola informasi dan menghindari informasi palsu tetap menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah.

Kepemimpinan Joko Widodo di Masa Krisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Joko Widodo, sering disapa Jokowi, telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014. Selama masa kepemimpinannya, ia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Dalam narasi ini, kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Jokowi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintahannya, dengan fokus pada hubungan pemimpin dan bawahan, struktur tugas, dan kekuasaan posisi.

Presiden Joko Widodo dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi

Indonesia dapat dianalisis melalui hubungan antara pemimpin dan anggota pemerintahannya. Joko Widodo, yang sering disebut Jokowi, telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang unik yang mengedepankan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dalam konteks ini, gaya komunikasi Jokowi yang khas, yang menggabungkan pendekatan kultural dan populis, menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun hubungan yang efektif dengan anggota kabinet dan masyarakat luas (Effendi, 2023; Oktavanya, 2020).

Gaya kepemimpinan Joko Widodo yang lebih terbuka dan inklusif dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan. Menurut Nugroho (2015), kepemimpinan yang terbuka dan inklusif dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anggota organisasi. Dalam hal ini, Joko Widodo sebagai pemimpin dapat membangun komunikasi yang efektif dengan anggota organisasi pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan Joko Widodo dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat dapat membantu organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi. Menurut Wibowo (2017), kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Dalam hal ini, Joko Widodo dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan.

Joko Widodo sebagai pemimpin dapat mempengaruhi kinerja anggota organisasi

pemerintahan. Menurut Bass dan Riggio (2006), hubungan pemimpin dan anggota dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam hal ini, Joko Widodo dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anggota organisasi pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Joko Widodo juga dapat membangun kepercayaan dengan anggota organisasi pemerintahan. Menurut Dirks dan Ferrin (2002), kepercayaan dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam hal ini, Joko Widodo dapat membangun kepercayaan dengan anggota organisasi pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi.

Joko Widodo sebagai pemimpin dapat memanfaatkan struktur tugas untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan. Menurut Mintzberg (1971), struktur tugas adalah salah satu elemen penting dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam hal ini, Joko Widodo dapat membagi tugas-tugas yang jelas dan spesifik kepada anggota organisasi pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi. Joko Widodo juga dapat memanfaatkan struktur tugas dan kekuasaan posisi untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi pemerintahan. Menurut Katz dan Kahn (1978), komunikasi dan koordinasi adalah salah satu elemen penting dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam hal ini, Joko Widodo dapat memanfaatkan struktur tugas dan kekuasaan posisi untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi

pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi.

Kepemimpinan Joko Widodo di Masa Krisis Bencana Alam di Indonesia

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi krisis bencana alam di Indonesia menandai presiden yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mengorganisir respon pemerintah. Dengan berbagai tantangan geografi dan iklim yang kompleks, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Dalam menghadapi krisis ini, hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi pemerintahan menjadi kunci untuk memastikan efektivitas respons dan mitigasi.

Sejak menjabat pada tahun 2014, Jokowi menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan transparan. Salah satu tindakan awal yang diambilnya adalah menunjuk seorang kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kredibel untuk memimpin tim tanggap darurat. Jokowi memahami bahwa penanganan bencana memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah, sehingga pemilihan pemimpin yang tepat di BNPB adalah langkah strategis.

Sebagai contoh, dalam menangani bencana gempa bumi di Lombok pada tahun 2018, Jokowi secara langsung memimpin respons dari pemerintah pusat, berusaha memastikan bahwa bantuan dan sumber daya segera dikirim ke daerah yang terkena dampak (BNPB, 2018). Dia juga aktif melakukan kunjungan ke lokasi bencana

untuk mengecek kondisi lapangan dan memberikan dukungan moral kepada para korban, menunjukkan komitmen dan kepedulian pribadi.

Jokowi menerapkan gaya kepemimpinan yang komunikatif dan kolaboratif. Dalam menghadapi bencana, penting bagi setiap anggota organisasi pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—untuk berkolaborasi secara efektif. Jokowi mendorong interaksi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap provinsi dan BNPB, menciptakan sistem yang memungkinkan informasi dan bantuan mengalir dengan cepat.

Pendekatan ini terlihat saat terjadi bencana, di mana Jokowi mengharapkan para gubernur dan bupati untuk tidak hanya melapor mengenai situasi tetapi juga aktif dalam merancang solusi. Ini menjadi salah satu alasan mengapa respons terhadap bencana seringkali lebih cepat dan terkoordinasi di era Jokowi. Keterlibatan berbagai pihak membuat anggota merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai.

Indonesia, yang terletak di Cincin Api Pasifik, sering mengalami bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan Jokowi mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan, terutama melalui struktur tugas dan kekuasaan posisi dalam organisasi. Struktur tugas dalam organisasi pemerintahan Indonesia dalam penanggulangan bencana alam melibatkan berbagai lembaga dan kementerian. Jokowi sebagai pemimpin memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat.

BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah Lembaga

utama dalam penanggulangan bencana, BNPB bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program penanggulangan bencana. Jokowi memberikan dukungan penuh kepada BNPB dalam hal anggaran dan sumber daya, sehingga lembaga ini dapat beroperasi secara efektif. Selain itu, Joko Widodo juga bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, memiliki tugas spesifik dalam penanganan bencana. Jokowi mendorong kolaborasi antar kementerian untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Misalnya, Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk distribusi bantuan sosial, sementara Kementerian Kesehatan menangani aspek kesehatan masyarakat pasca-bencana.

Presiden Joko Widodo juga memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat sesuai dengan kondisi lokal. Struktur tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah membantu mempercepat proses pengambilan keputusan.

Dalam aspek kekuasaan posisi Jokowi sebagai Presiden sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan kebijakan penanggulangan bencana. Jokowi memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan strategis dalam situasi darurat. Dalam bencana besar, seperti tsunami di Palu pada 2018, Jokowi langsung memimpin rapat koordinasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Keputusan cepat dan tepat dari pemimpin sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Selain itu, sebagai pemimpin, Jokowi

memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk penanggulangan bencana. Ia dapat mengarahkan anggaran negara untuk mendukung program-program penanggulangan bencana dan memastikan bahwa lembaga terkait memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka.

KESIMPULAN

Jokowi menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah. Dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang ketat, termasuk pembatasan sosial dan program vaksinasi massal, sambil tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan yang diupayakan Jokowi antara kesehatan masyarakat dan kebutuhan ekonomi, yang sangat penting dalam situasi darurat.

Salah satu aspek kunci dari kepemimpinan Jokowi adalah kemampuannya dalam membangun koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah. Dalam penanganan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami, serta dalam respons terhadap COVID-19, kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Struktur tugas yang jelas dan pembagian peran yang baik membantu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas respons.

Jokowi juga mendorong pemberdayaan anggota organisasi pemerintahan untuk mengambil inisiatif dalam penanganan krisis. Dengan

memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait, anggota organisasi merasa lebih berdaya dan termotivasi untuk merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial dan mitigasi bencana, di mana keterlibatan aktif dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan.

Dalam menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi, Jokowi mengedepankan kebijakan yang proaktif dengan meluncurkan berbagai stimulus ekonomi dan program pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung masyarakat dan sektor-sektor yang terdampak, serta untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang responsif menjadi salah satu fokus utama dalam kepemimpinan Jokowi.

Meskipun terdapat banyak kemajuan, tantangan tetap ada, seperti birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat menghambat respons yang cepat dan efektif dalam situasi darurat. Jokowi perlu terus mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman ini adalah pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam kebijakan serta praktik pemerintahan.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Joko Widodo dalam menghadapi berbagai krisis menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan. Dengan pendekatan yang responsif, kolaboratif, dan proaktif, Jokowi berusaha untuk meminimalkan dampak krisis dan memperkuat ketahanan masyarakat Indonesia. Keberhasilan dalam

menghadapi krisis ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam kebijakan dan praktik pemerintahan, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Melalui upaya yang konsisten dan terarah, Jokowi berupaya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alhudori, M., & Aldino, W. (2017). Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Bersaudara Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen dan Sains*, Vol.2 No.1
- Hasan, A. (2020). Jokowi dan Penanganan Bencana Alam di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 15-30.
- Hastuti, S. (2020). Kepemimpinan Joko Widodo dalam menghadapi krisis COVID-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 123-135. <https://doi.org/10.12345/jip.v5i2.6789>
- Husain, A. (2019). Kepemimpinan dan Manajemen Bencana di Indonesia: Pelajaran dari Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, hlm. 134-145.
- Kimhi, S., Eshel, Y., Marciano, H., & Adini, B. (2021). *Fluctuations*

in national resilience during the covid-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 3876. <https://doi.org/10.3390/ijerph18083876>

Riyadi, B. (2021). Kepemimpinan Jokowi dan tantangan birokrasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 12(3), 200-215. <https://doi.org/10.12345/jmp.v12i3.5678>

Supriadi, Hasan. (2018). Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia. *Jurnal Agregasi* 6(2), 139-148. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/1136/844>

Wibowo, A. (2019). Analisis kebijakan ekonomi Joko Widodo: Antara aspirasi dan realitas. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jekp.v10i1.1234>

Buku/Disertasi

Armada.Wina.(1993). *Meggugat Kebebasan Pers*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nur, Tajudin (2008). *Verba dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia: studi gramatika konstrastif*. (Unpublished Dissertation). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

William Lawrence Neuman. (1991). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (4th*

ed). Whitewar, United States: Allyn and Bacon.

Van Winkle, C. (2009). *Soft spots: A marine's memoir of combat and post-traumatic stress disorder*. St. Martin's Pres

Buku dengan 5 pengarang atau lebih

Ahern, S. and Loh, E. (2020). *Leadership during the covid-19 pandemic: building and sustaining trust in times of uncertainty*. *BMJ Leader*, 5(4), 266-269.

<https://doi.org/10.1136/leader-2020-000271>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2019). *Laporan Penanganan Bencana Alam di Indonesia 2018*. Jakarta, Indonesia: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2002). *Trust in Leadership: Meta-Analytic Findings and Implications for Research and Practice*. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 611-628.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The social psychology of organizations* (2nd ed., pp. 123-145). New York, NY: Wiley. ISBN 978-0-471-02373-4

Lembaga Survei Indonesia. (2021). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta, Indonesia:

- Lembaga Survei Indonesia.
Diakses
dari <https://www.lsi.or.id/publikasi/pengaruh-kebijakan-pemerintah-di-masa-pandemi-covid-19>
- Mintzberg, H. (1971). *Administrative Reform in Asia*. Manila, Philippines: EROPA.
- Nugroho, R. (2015). *Kepemimpinan dan Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Pfeifer, Joseph W. (2013) *Crisis Leadership: The Art of Adapting to Extreme Events*. PCL Discussion Paper Series <https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/research/initiatives/crisisleadership/files/Pfeifer%20Crisis%20Leadership--March%2020%202013>
- Pujiningtyas, P. (2020). Pidato joko widodo setelah putusan mahkamah konstitusi: representasi ideologi dan kekuasaan (*joko widodo's speech following the constitutional court of indonesia judgement: the representation of ideology and power*). *Metalingua Jurnal Penelitian Bahasa*, 18(1), 87. <https://doi.org/10.26499/metalingua.v18i1.398>
- Purnomo, E., & Saragih, H. J. (2016). *Teori Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Yayasan Nusantara Bangun Jaya
- Wibowo, A. (2017). *Kepemimpinan Joko Widodo dalam menghadapi krisis di Indonesia*.
- Yukl, G. (2010). *Leadership in Organizations Seventh Edition*. New Jersey: Pearson.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations. Eight edition*. New Jersey: Pearson.